

Kebijakan Pembangunan Nasional dalam RKP 2021 dan Penjabarannya di Daerah

Drs. Oktorialdi, MA, Ph.D

**Staf Ahli Menteri PPN Bidang Pemerataan dan Kewilayahan
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas**

**Disampaikan pada:
Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Kortekbang) Tahun 2020
Surabaya, 2 Maret 2020**



OUTLINE

- 1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024
- 2 Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021
- 3 Kebijakan Dana Transfer 2020-2024

1 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN) 2020-2024



7 AGENDA PEMBANGUNAN DAN LANGKAH KONKRET PENCAPAIANNYA

7 AGENDA PEMBANGUNAN

-  1 Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
-  2 Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan
-  3 SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
-  4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
-  5 Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar
-  6 Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
-  7 Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

UNTUK MEWUJUDKAN SASARAN JANGKA MENENGAH, RPJMN 2020-2024 MEMUAT PROYEK DENGAN DAYA UNGKIT TINGGI.

41 PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT), antara lain:

- 10 Destinasi Pariwisata Prioritas : **Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai**
- Jalan Tol Trans Sumatera Aceh-Lampung
- Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan *Stunting*



KERANGKA PIKIR 7 AGENDA PEMBANGUNAN

Didukung
oleh:

3 **SDM Berkualitas dan Berdaya Saing**
4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

5 **Pembangunan Infrastruktur**

Dilaksanakan
melalui:

1 **Transformasi ekonomi:**
Rata-rata
Pertumbuhan 6% per
tahun

2
Wilayah sebagai
Basis Pembangunan

Memperhatikan/
mempertimbangkan kondisi:

6
Lingkungan Hidup dan
Kerentanan Bencana

Sebagai Prasyarat:

7
Kondisi Polhukhankam yang kondusif:

- **Penyederhanaan regulasi**
- **Penyederhanaan birokrasi**
- **Stabilitas politik dan pertahanan keamanan**

7 AGENDA PEMBANGUNAN DALAM RPJMN 2020-2024

AGENDA PEMBANGUNAN (PRIORITAS NASIONAL) 2



Kegiatan Prioritas

1. Pengembangan Kawasan Strategis
2. Pengembangan Sektor Unggulan
3. Pengembangan Kawasan Perkotaan

4. Pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi
5. Kelembagaan dan Keuangan Daerah

AGENDA PEMBANGUNAN (PRIORITAS NASIONAL) 3



AGENDA PEMBANGUNAN (PRIORITAS NASIONAL) 4



AGENDA PEMBANGUNAN (PRIORITAS NASIONAL) 5



AGENDA PEMBANGUNAN (PRIORITAS NASIONAL) 6



2 RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) 2021





KONDISI SAAT INI: LINGKUNGAN EKSTERNAL

Munculnya kasus penyebaran virus corona menambah risiko ketidakpastian perekonomian global 2020 yang masih menghadapi isu geo-ekonomi-politik



Brexit

Inggris telah resmi keluar dari Uni Eropa per 31 Januari 2020, namun masih akan menjalani masa transisi 11 bulan untuk finalisasi kesepakatan dengan Uni Eropa.



Perang Dagang AS-China

Meski terdapat sinyal positif dari kesepakatan fase I, beberapa permasalahan fundamental belum disentuh (ex: subsidi BUMN China dan transfer teknologi).



Novel Coronavirus



43. Kasus



28 Negara

- Novel Coronavirus (2019-nCoV) merupakan virus baru penyebab penyakit saluran pernafasan yang pertamakali ditemukan di Kota Wuhan, China.
- Wabah coronavirus **diprediksikan akan menekan perekonomian China** yang bisa **berdampak ke seluruh dunia melalui *supply chain*, pariwisata dan harga komoditas.**

TANTANGAN EKSTERNAL DAN PERLUNYA ANTISIPASI

TANTANGAN GLOBAL

Perang Dagang AS-RRT

Virus COVID -19 (Coronavirus Disease 19)

Perlambatan Pertumbuhan Ekonomi RRT

PERKIRAAN DAMPAK BAGI DAERAH

Daerah-daerah Pariwisata, Industri, Perkebunan, Perikanan dan Perdagangan

Jangka Pendek (1-6 bulan):

1. Menurunnya kunjungan wisatawan
2. Berkurangnya pasokan impor bahan baku industri
3. Menurunnya permintaan ekspor komoditas perikanan dan perkebunan
4. Menurunnya arus perdagangan
5. Meningkatnya inflasi

Jangka Menengah (7-12 bulan):

1. Berkurangnya kapasitas produksi
2. Menurunnya laju pertumbuhan ekonomi
3. Meningkatnya PHK dan angka pengangguran
4. Meningkatnya angka kemiskinan
5. Meningkatnya kredit macet

LANGKAH ANTISIPASI

- Rapat Terbatas **Kesiapan Menghadapi Virus Corona**, Selasa (4/2/2020)
- Sidang Kabinet Paripurna **Antisipasi Dampak Perekonomian Global**, Selasa, 11/2/2020
- Rapat Terbatas **Ketersediaan Bahan Baku Bagi Industri Besi dan Baja**, Rabu (12/2/2020)
- Rapat Terbatas **Akselerasi Peningkatan Peringkat Kemudahan Berusaha**, Rabu (12/2/2020)

Kebijakan Fiskal 2020:

- Percepatan pencairan anggaran
- Pindahkan kegiatan di daerah terkena dampak

RKP dan Kebijakan Fiskal 2021:

- Kebijakan *counter cyclical* bagi daerah-daerah terkena dampak

DAERAH-DAERAH YANG BERISIKO TERDAMPAK (1)

1. Provinsi penghasil minyak:

- **Jawa Timur (Bojonegoro)**, Jawa Tengah (Cepu, Blora), Riau (Rokan), **Kalimantan Timur**, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Kepulauan Riau, Jambi

2. Provinsi penghasil gas:

- **Papua Barat (Teluk Bintuni)**, **Kalimantan Timur (Blok Mahakam)**, Sumatera Selatan (Musi Banyuasin), Kepulauan Riau (Natuna), Jawa Barat

3. Provinsi penghasil karet:

- Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Riau, Jambi, **Kalimantan Barat (7,6%)**, dan sisanya tersebar di **Kalimantan Selatan**, Lampung, **Kalimantan Tengah**, Sumatera Barat, dan Bengkulu

4. Provinsi penghasil sawit: Riau, Sumatera Utara, **Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah**, Sumatera Selatan, **Kalimantan Timur**, Jambi

5. Provinsi penghasil ikan/udang/hasil laut: Jawa Tengah, **Jawa Timur**, Riau, Kepulauan Riau, **Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan**, Jawa Barat, Lampung, Sumatera Selatan

6. Provinsi tujuan wisata:

- Provinsi-provinsi dengan share PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makanan minuman yang relatif besar: Bali (23,3 persen), DI Yogyakarta (10,2 persen), **Jawa Timur (5,8 persen)**, DKI Jakarta (4,8 persen) dan Jawa Tengah (3,1 persen)
- Provinsi-provinsi dengan share PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makanan minuman setidaknya 2 persen: Jawa Barat, **Nusa Tenggara Barat**, Kep. Bangka Belitung, Banten, Sumatera Utara

DAERAH-DAERAH YANG BERISIKO TERDAMPAK (2)

7. **Provinsi basis industri tekstil dan produk tekstil serta alas kaki: :**
 - Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten
8. **Provinsi basis industri elektronik:**
 - Jawa Barat, Kepulauan Riau (Batam), DKI Jakarta, **Jawa Timur**, Jawa Tengah
9. **Provinsi basis industri otomotif & komponen: :**
 - Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, **Jawa Timur**, Jawa Tengah, Kepulauan Riau
10. **Provinsi basis industri logam dasar:**
 - Banten, **Jawa Timur**, Jawa Barat, Kepulauan Riau, Kep. Bangka Belitung, Sulawesi Tengah, Sumatera Utara, DKI Jakarta
11. **Provinsi basis industri makanan & minuman:**
 - **Jawa Timur**, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta

TEMA RKP 2021



**SKALA PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHAP KE-4 RPJPN 2005-2025
(RPJMN 2020-2024) (disadur dari UU RPJPN No.17/2007)**

Percepatan pembangunan dengan menekankan terbangunnya **struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif** di berbagai wilayah yang didukung oleh **SDM berkualitas dan berdaya saing**



TEMA PEMBANGUNAN RKP 2021

Meningkatkan Industri, Pariwisata dan Investasi di Berbagai Wilayah Didukung oleh SDM, dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan Berkualitas

TEMA DAN PRIORITAS NASIONAL RKP 2021

SKALA PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHAP KE-4 RPJPN 2005-2025 (RPJMN 2020-2024) (disadur dari UU RPJPN No.17/2007)



Percepatan pembangunan dengan menekankan terbangunnya **struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif** di berbagai wilayah yang didukung oleh **SDM berkualitas dan berdaya saing**

TEMA PEMBANGUNAN RKP 2021



Meningkatkan Industri, Pariwisata dan Investasi di Berbagai Wilayah Didukung oleh SDM, dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan Berkualitas

PRIORITAS NASIONAL (PN) RKP 2021 = AGENDA PEMBANGUNAN DALAM RPJMN 2020-2024 (SEBAGAIMANA PERPRES NO.18/2020)

| | | | | | | |
|---|---|---|--|---|--|---|
| <p>Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan</p> | <p>Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan</p> | <p>SDM berkualitas dan berdaya saing</p> | <p>Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan</p> | <p>Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar</p> | <p>Lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim</p> | <p>Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik</p> |
| <p>PN 1</p> | <p>PN 2</p> | <p>PN 3</p> | <p>PN 4</p> | <p>PN 5</p> | <p>PN 6</p> | <p>PN 7</p> |

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN WILAYAH JAWA-BALI (Provinsi Jawa Timur)

Sasaran Pembangunan

| Provinsi | Indikator Pembangunan | Realisasi 2018 | Realisasi 2019 | Target Pembangunan | | | | |
|------------|----------------------------------|----------------|----------------|--------------------|------|------|------|------|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Jawa Timur | Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) | 5,50 | 5,52 | 5,60 | 5,80 | 6,00 | 6,10 | 6,20 |
| | Tingkat Kemiskinan (%) | 10,98 | | 10,08 | 9,71 | 9,29 | 8,65 | 8,11 |
| | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | 3,99 | | 3,60 | 3,40 | 3,20 | 2,80 | 2,50 |

Keterangan:

Relatif aman dari dampak virus Corona
 Terdampak oleh virus Corona
 Terdampak parah oleh virus Corona

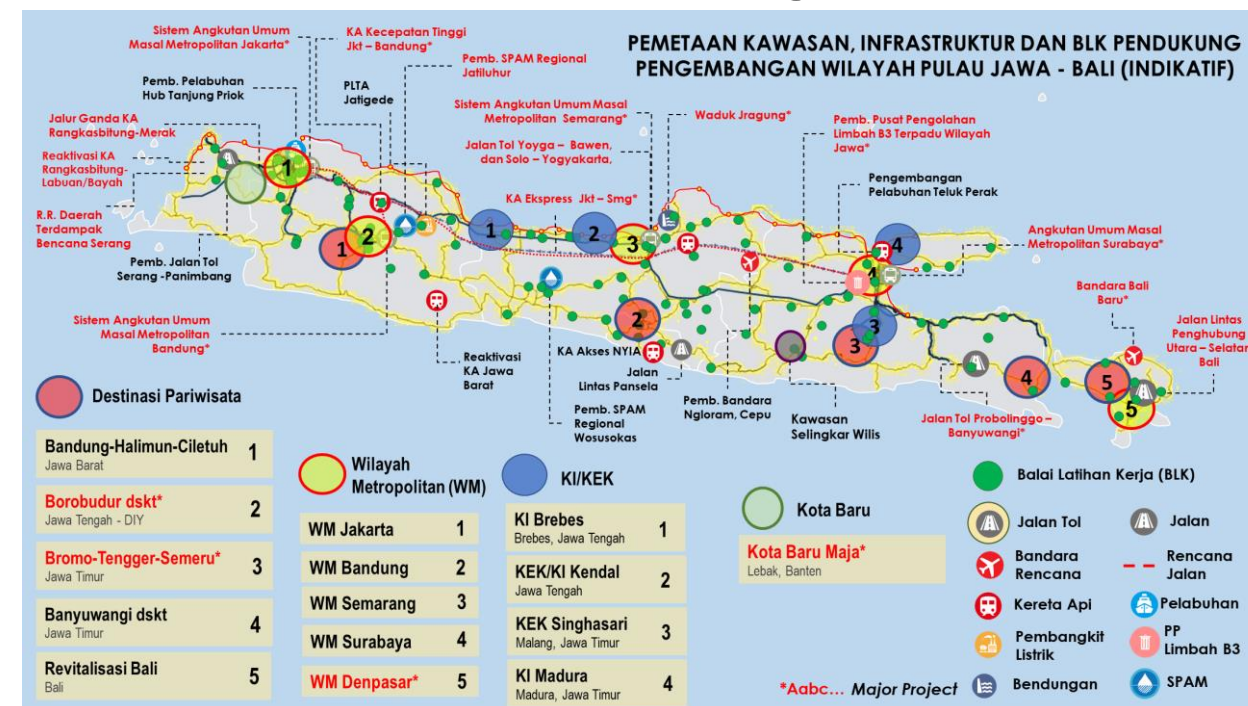
Kebutuhan Investasi

| Provinsi | Keb. Investasi | Realisasi 2018 | Realisasi 2019 | Target Pembangunan | | | | |
|------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|--------|--------|--------|----------|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Jawa Timur | Rp Triliun | 586,22 | 637,08 | 697,12 | 760,78 | 839,91 | 935,73 | 1.035,87 |

Koridor Pertumbuhan dan Pemerataan

| Provinsi | No. | Kabupaten/Kota | No. | Kabupaten/Kota |
|----------------------------|-----|-----------------------|-----|---------------------|
| Koridor Pertumbuhan | | | | |
| Jawa Timur | 1 | Kabupaten Tuban | 1 | Kabupaten Kediri |
| | 2 | Kabupaten Lamongan | 2 | Kota Kediri* |
| | 3 | Kabupaten Gresik | 3 | Kabupaten Bondowoso |
| | 4 | Kota Surabaya | 4 | Kabupaten Lumajang |
| | 5 | Kabupaten Sidoarjo | 5 | Kabupaten Jember |
| | 6 | Kabupaten Mojokerto | 6 | Kabupaten Pamekasan |
| | 7 | Kota Mojokerto | 7 | Kabupaten Sumenep |
| | 8 | Kabupaten Bangkalan | | |
| | 9 | Kabupaten Pasuruan | | |
| | 10 | Kota Pasuruan* | | |
| | 11 | Kabupaten Probolinggo | | |
| | 12 | Kota Probolinggo* | | |
| | 13 | Kabupaten Situbondo | | |
| | 14 | Kabupaten Banyuwangi | | |
| | 15 | Kabupaten Malang | | |
| | 16 | Kota Malang* | | |
| | 17 | Kota Batu* | | |

Prioritas Pembangunan



Dalam semester 1 Tahun 2020

- Provinsi Jawa Timur diperkirakan akan merasakan dampak dari menurunnya kunjungan wisatawan asing dan perlambatan ekonomi dunia.
- Pengamanan terhadap pasokan bahan baku industri pengolahan di Jawa Timur.

Prioritas Tahun 2021

- Percepatan pengembangan kawasan perdesaan dan penguatan keterkaitan desa-kota.
- Percepatan pengembangan kawasan-kawasan ekonomi.

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN WILAYAH NUSA TENGGARA

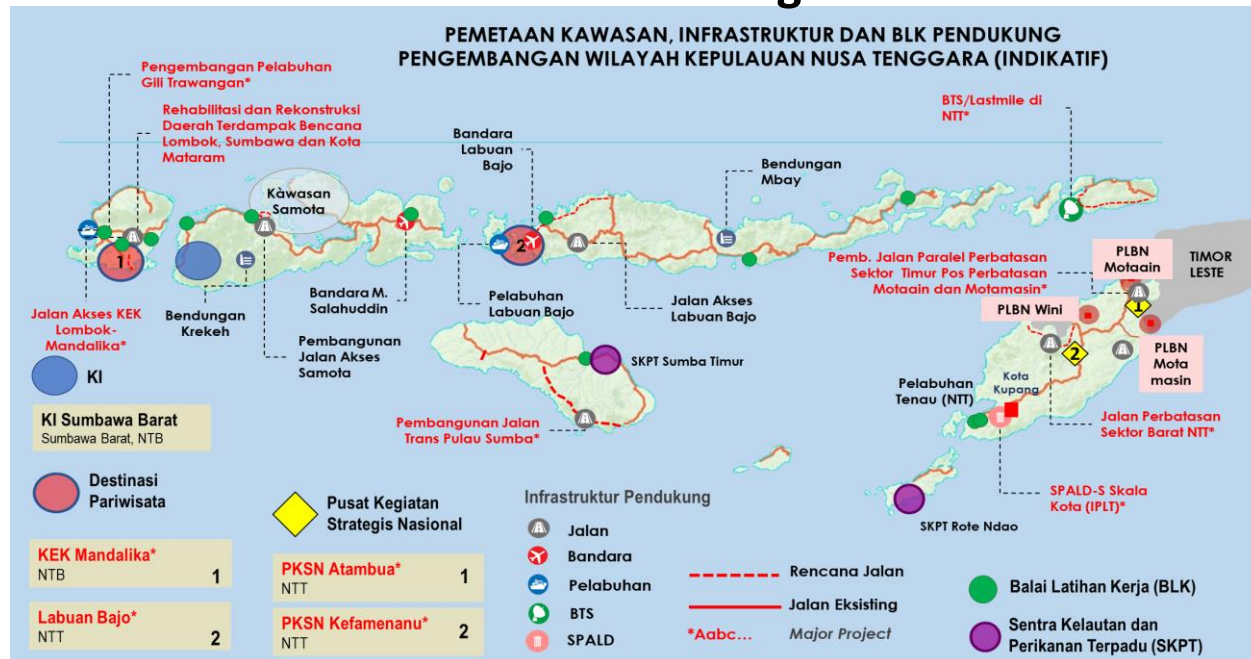
Sasaran Pembangunan

| Provinsi | Indikator Pembangunan | Realisasi 2018 | Realisasi 2019 | Target Pembangunan | | | | |
|---------------------|----------------------------------|----------------|----------------|--------------------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Nusa Tenggara Barat | Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) | 4,56 | 4,01 | 4,30 | 4,90 | 5,50 | 6,20 | 6,60 |
| | Tingkat Kemiskinan (%) | 14,75 | | 13,52 | 13,00 | 12,35 | 10,85 | 8,95 |
| | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | 3,72 | | 3,50 | 3,30 | 3,20 | 2,70 | 2,40 |
| Nusa Tenggara Timur | Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) | 5,13 | 5,20 | 5,60 | 6,50 | 6,90 | 7,30 | 7,50 |
| | Tingkat Kemiskinan (%) | 21,35 | | 18,00 | 17,35 | 16,15 | 14,56 | 12,35 |
| | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | 3,01 | | 2,70 | 2,70 | 2,60 | 2,20 | 2,00 |

Keterangan:

■ Relatif aman dari dampak virus Corona
 ■ Terdampak oleh virus Corona
 ■ Terdampak parah oleh virus Corona

Prioritas Pembangunan



Kebutuhan Investasi

| Provinsi | Keb. Investasi | Realisasi 2018 | Realisasi 2019 | Target Pembangunan | | | | |
|----------|----------------|----------------|----------------|--------------------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| NTB | Rp Triliun | 2,34 | 30,17 | 41,09 | 47,20 | 56,59 | 64,59 | 73,94 |
| NTT | Rp Triliun | 40,07 | 44,93 | 57,35 | 63,91 | 71,47 | 80,94 | 91,78 |

Koridor Pembangunan

| Provinsi | No. | Kabupaten/Kota | Provinsi | No. | Kabupaten/Kota |
|----------------------------|-----|-------------------------|----------|-----|--------------------------------|
| Koridor Pertumbuhan | | | | | |
| NTB | 1 | Kabupaten Lombok Barat | NTT | 1 | Kabupaten Manggarai Barat |
| | 2 | Kota Mataram* | | 2 | Kabupaten Manggarai |
| | 3 | Kabupaten Lombok Tengah | | 3 | Kabupaten Manggarai Timur |
| | 4 | Kabupaten Lombok Timur | | 4 | Kabupaten Ngada |
| | 5 | Kabupaten Sumbawa Barat | | 5 | Kabupaten Nagekeo |
| | 6 | Kabupaten Sumbawa | | 6 | Kabupaten Ende |
| | 7 | Kota Bima | | 7 | Kabupaten Sikka |
| | 8 | Kabupaten Dompu | | 8 | Kota Kupang* |
| | 9 | Kabupaten Bima | | 9 | Kabupaten Kupang |
| Koridor Pemerataan | | | | | |
| NTB | 1 | Kabupaten Lombok Utara | NTT | 1 | Kabupaten Sumba Timur |
| | 2 | | | 2 | Kabupaten Sumba Tengah |
| | 3 | | | 3 | Kabupaten Sumba Barat |
| | 4 | | | 4 | Kabupaten Sumba Barat Daya |
| | 5 | | | 5 | Kabupaten Timor Tengah Selatan |
| | 6 | | | 6 | Kabupaten Timor Tengah Utara |
| | 7 | | | 7 | Kabupaten Malaka |
| | 8 | | | 8 | Kabupaten Belu |

Dalam semester 1 Tahun 2020

- Provinsi NTB dan NTT diperkirakan akan merasakan dampak dari menurunnya kunjungan wisatawan asing.
- Pelaksanaan kegiatan rapat, seminar dan kunjungan wisata di NTB dan NTT.

Prioritas Tahun 2021

- Penyediaan insentif dan kegiatan pariwisata nasional
- Perluasan kerjasama promosi pariwisata internasional

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN WILAYAH KALIMANTAN (1/2)

Sasaran Pembangunan

| Provinsi | Indikator Pembangunan | Realisasi 2018 | Realisasi 2019 | Target Pembangunan | | | | |
|--------------------|----------------------------------|----------------|----------------|--------------------|------|------|------|------|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Kalimantan Barat | Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) | 5,06 | 5,00 | 5,10 | 5,50 | 5,90 | 6,70 | 7,10 |
| | Tingkat Kemiskinan (%) | 7,77 | | 6,43 | 6,00 | 5,45 | 4,25 | 3,15 |
| | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | 4,26 | | 4,00 | 3,70 | 3,60 | 3,10 | 2,80 |
| Kalimantan Tengah | Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) | 5,64 | 6,16 | 5,80 | 6,10 | 6,40 | 6,70 | 6,90 |
| | Tingkat Kemiskinan (%) | 5,17 | | 4,72 | 4,34 | 3,79 | 2,85 | 2,05 |
| | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | 4,01 | | 3,70 | 3,70 | 3,60 | 3,30 | 3,20 |
| Kalimantan Selatan | Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) | 5,13 | 4,08 | 3,90 | 4,50 | 4,80 | 5,60 | 6,00 |
| | Tingkat Kemiskinan (%) | 4,54 | | 4,20 | 4,00 | 3,75 | 3,24 | 2,74 |
| | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | 4,50 | | 4,20 | 4,00 | 3,90 | 3,40 | 3,10 |
| Kalimantan Timur | Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) | 2,67 | 4,77 | 5,80 | 6,70 | 7,10 | 8,00 | 8,50 |
| | Tingkat Kemiskinan (%) | 6,03 | | 5,58 | 5,25 | 4,66 | 4,11 | 3,24 |
| | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | 6,60 | | 6,20 | 6,00 | 5,80 | 5,40 | 5,10 |
| Kalimantan Utara | Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) | 6,04 | 6,91 | 6,70 | 7,10 | 7,40 | 7,80 | 8,10 |
| | Tingkat Kemiskinan (%) | 7,09 | | 5,85 | 5,44 | 4,45 | 4,11 | 3,74 |
| | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | 5,22 | | 4,60 | 4,40 | 4,30 | 3,80 | 3,50 |

Koridor Pembangunan

| Provinsi | No. | Kabupaten/Kota | Provinsi | No. | Kabupaten/Kota |
|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------|-----|------------------------------|
| Koridor Pertumbuhan | | | | | |
| Kalimantan Barat | 1 | Kota Pontianak* | Kalimantan Selatan | 1 | Kabupaten Barito Kuala |
| | 2 | Kabupaten Kubu Raya | | 2 | Kota Banjarmasin |
| | 3 | Kabupaten Ketapang | | 3 | Kabupaten Banjar |
| Kalimantan Tengah | 1 | Kabupaten Lamandau | | 4 | Kota Banjar Baru |
| | 2 | Kabupaten Kotawaringin Timur | | 5 | Kabupaten Tanah Laut |
| | 3 | Kabupaten Katingan | | 6 | Kabupaten Tanah Bumbu |
| Kalimantan Timur | 4 | Kota Palangkaraya* | | 7 | Kabupaten Kota Baru |
| | 1 | Kota Balikpapan* | Kalimantan Utara | 1 | Kota Tarakan* |
| | 2 | Kota Samarinda* | | | |
| 3 | Kabupaten Kutai Kartanegara | | | | |
| 4 | Kabupaten Penajam Paser Utara | | | | |
| Koridor Pemerataan | | | | | |
| Kalimantan Utara | 1 | Kabupaten Malinau | Kalimantan Tengah | 1 | Kabupaten Kotawaringin Barat |
| | 2 | Kabupaten Nunukan | | 2 | Kabupaten Pulang Pisau |
| | 3 | Kabupaten Bulungan | | 3 | Kabupaten Seruyan |
| | 4 | Kabupaten Tana Tidung | Kalimantan Barat | 1 | Kabupaten Sambas |
| Kalimantan Timur | 1 | Kabupaten Paser | | 2 | Kota Singkawang* |
| | 2 | Kabupaten Kutai Barat | | 3 | Kabupaten Bengkayang |
| | 3 | Kabupaten Kutai Timur | | 4 | Kabupaten Landak |
| | 4 | Kabupaten Bontang | | 5 | Kabupaten Mempawah |
| | 5 | Kabupaten Berau | | | |

Dalam semester 1 Tahun 2020

- Provinsi di Kalimantan diperkirakan akan relatif aman dan kurang merasakan dampak dari menurunnya kunjungan wisatawan asing dan perlambatan ekonomi dunia.
- Kebijakan fiskal tahun 2020 perlu diarahkan untuk mengembangkan kegiatan ekonomi daerah.

Prioritas Tahun 2021

- Pembangunan IKN perlu diarahkan untuk membawa dampak berganda dan aglomerasi bagi seluruh provinsi di Kalimantan.
- Pengembangan kawasan-kawasan ekonomi.

Keterangan:

- Relatif aman dari dampak virus Corona
- Terdampak oleh virus Corona
- Terdampak parah oleh virus Corona

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN WILAYAH SULAWESI (1/2)

Sasaran Pembangunan

| Provinsi | Indikator Pembangunan | Realisasi 2018 | Realisasi 2019 | Target Pembangunan | | | | |
|-------------------|----------------------------------|----------------|----------------|--------------------|-------|-------|-------|------|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Sulawesi Utara | Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) | 6,01 | 5,66 | 6,20 | 6,60 | 6,70 | 7,30 | 7,60 |
| | Tingkat Kemiskinan (%) | 7,80 | | 7,00 | 6,65 | 6,15 | 5,53 | 4,25 |
| | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | 6,86 | | 6,70 | 6,50 | 6,30 | 5,90 | 5,60 |
| Sulawesi Tengah | Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) | 6,30 | 7,15 | 7,60 | 7,70 | 8,00 | 8,30 | 8,60 |
| | Tingkat Kemiskinan (%) | 14,75 | | 13,00 | 12,59 | 11,65 | 10,85 | 9,76 |
| | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | 3,43 | | 3,30 | 3,30 | 3,20 | 2,80 | 2,40 |
| Sulawesi Selatan | Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) | 7,07 | 6,92 | 7,10 | 7,50 | 7,70 | 8,10 | 8,40 |
| | Tingkat Kemiskinan (%) | 9,06 | | 8,46 | 8,25 | 7,35 | 6,75 | 5,68 |
| | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | 4,50 | | 5,20 | 5,10 | 5,00 | 4,50 | 4,20 |
| Sulawesi Tenggara | Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) | 6,42 | 6,51 | 6,40 | 6,80 | 7,10 | 8,60 | 8,90 |
| | Tingkat Kemiskinan (%) | 11,25 | | 10,76 | 10,36 | 9,35 | 8,15 | 7,00 |
| | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | 3,26 | | 3,30 | 3,20 | 3,10 | 2,80 | 2,40 |
| Gorontalo | Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) | 6,51 | 6,41 | 6,50 | 6,80 | 7,20 | 7,80 | 7,90 |
| | Tingkat Kemiskinan (%) | 16,81 | | 15,00 | 14,58 | 12,55 | 10,87 | 9,06 |
| | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | 4,03 | | 3,60 | 3,40 | 3,20 | 2,80 | 2,40 |
| Sulawesi Barat | Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) | 6,23 | 5,66 | 5,10 | 5,40 | 5,70 | 6,40 | 8,70 |
| | Tingkat Kemiskinan (%) | 11,25 | | 9,62 | 9,36 | 8,79 | 7,51 | 4,95 |
| | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | 3,16 | | 3,00 | 2,90 | 2,70 | 2,30 | 2,00 |

Kebutuhan Investasi

| Provinsi | Keb. Investasi | Realisasi 2018 | Realisasi 2019 | Target Pembangunan | | | | |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Kalimantan Barat | Rp Triliun | 63,81 | 70,29 | 79,01 | 87,79 | 98,45 | 111,05 | 127,78 |
| Kalimantan Tengah | Rp Triliun | 56,74 | 62,86 | 69,57 | 77,81 | 87,89 | 99,38 | 114,37 |
| Kalimantan Selatan | Rp Triliun | 39,05 | 42,50 | 46,09 | 50,38 | 55,20 | 60,85 | 68,41 |
| Kalimantan Timur | Rp Triliun | 174,70 | 188,95 | 212,55 | 249,79 | 287,30 | 332,56 | 396,73 |
| Kalimantan Utara | Rp Triliun | 29,84 | 33,49 | 40,93 | 46,15 | 52,26 | 59,26 | 68,69 |

Dalam semester 1 Tahun 2020

- Provinsi Sulawesi Utara diperkirakan akan merasakan dampak langsung dari menurunnya kunjungan wisatawan asing dan perlambatan ekonomi dunia.
- Kebijakan fiskal tahun 2020 perlu diarahkan untuk mengembangkan kegiatan ekonomi daerah.

Prioritas Tahun 2021

- Penyediaan insentif dan kegiatan pariwisata nasional.
- Pengembangan kawasan-kawasan ekonomi.

Keterangan:

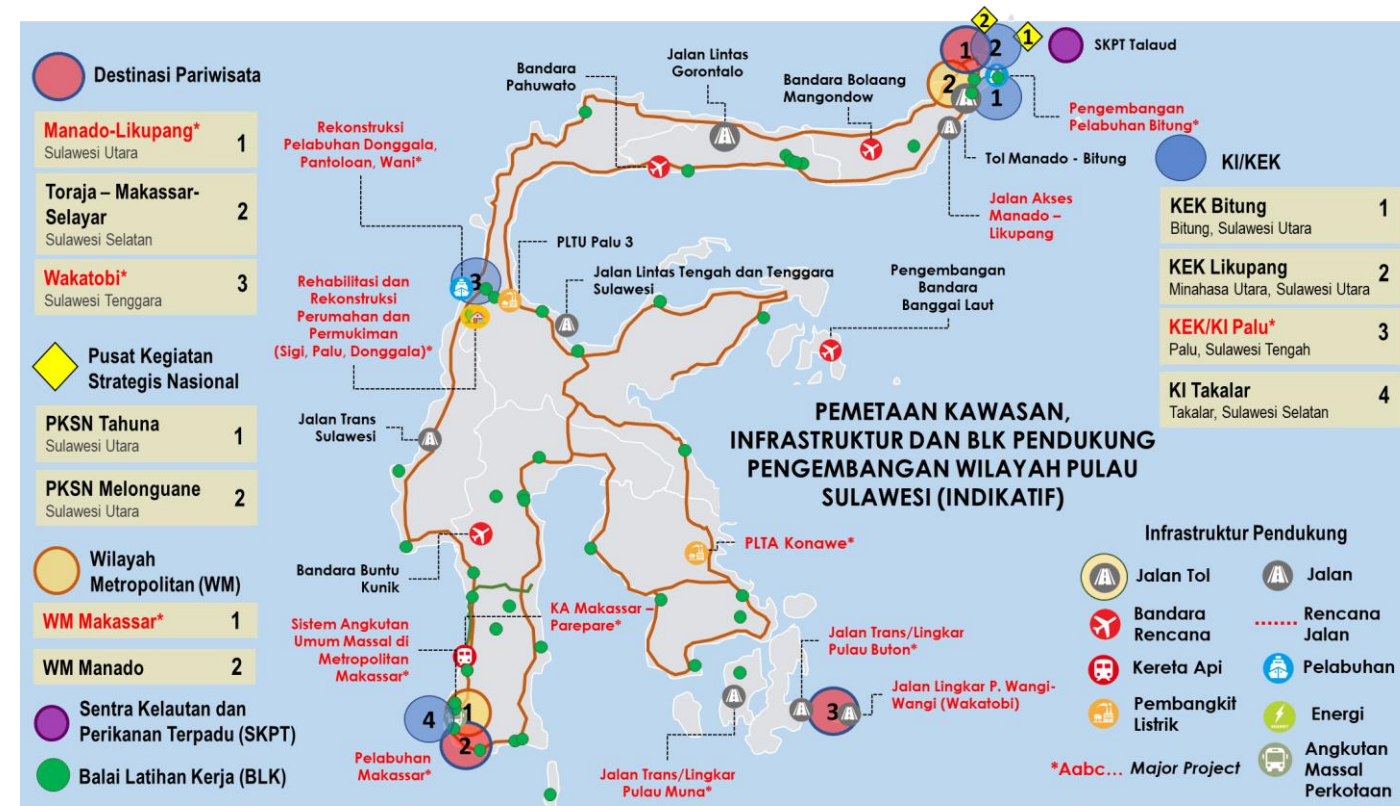
■ Relatif aman dari dampak virus Corona
 ■ Terdampak oleh virus Corona
 ■ Terdampak parah oleh virus Corona

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN WILAYAH SULAWESI (2/2)

Koridor Pembangunan

| Provinsi | No. | Kab/Kota | Provinsi | No. | Kabupaten/Kota |
|----------------------------|-----|-----------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|
| Koridor Pertumbuhan | | | | | |
| Sulawesi Utara | 1 | Kabupaten Minahasa Utara | Sulawesi Selatan | 1 | Kabupaten Luwu Timur |
| | 2 | Kota Manado | | 2 | Kabupaten Luwu Utara |
| | 3 | Kabupaten Minahasa | | 3 | Kabupaten Luwu |
| | 4 | Kota Bitung | | 4 | Kota Palopo* |
| | 5 | Kota Tomohon | | 5 | Kabupaten Wajo |
| | 6 | Kabupaten Minahasa Selatan | | 6 | Kabupaten Soppeng |
| | 7 | Kabupaten Bolaang Mongondow | | 7 | Kota Pinrang |
| | 8 | Kabupaten Bolaang Mongondow Utara | | 8 | Kota Parepare* |
| Sulawesi Tengah | 1 | Kabupaten Buol | 9 | Kabupaten Barru | |
| | 2 | Kabupaten Tolitoli | 10 | Kabupaten Pangkajene Kepulauan | |
| | 3 | Kabupaten Parigi Moutong | 11 | Kabupaten Maros | |
| | 4 | Kabupaten Donggala | 12 | Kota Makassar | |
| | 5 | Kota Palu* | 13 | Kabupaten Gowa | |
| | 6 | Kabupaten Poso | 14 | Kabupaten Takalar | |
| Sulawesi Tenggara | 1 | Kabupaten Kolaka Utara | Gorontalo | 1 | Kabupaten Gorontalo Utara |
| | 2 | Kabupaten Kolaka | | 2 | Kabupaten Gorontalo |
| | 3 | Kabupaten Kolaka Timur | | 3 | Kota Gorontalo* |
| | 4 | Kota Kendari* | Sulawesi Barat | 1 | Kabupaten Polewali Mandar |
| | 5 | Kabupaten Konawe | | 2 | Kabupaten Majene |
| | | | 3 | Kabupaten Mamuju* | |
| | | | 4 | Kabupaten Mamuju Tengah | |
| Koridor Pemerataan | | | | | |
| Sulawesi Utara | 1 | Kabupaten Kepulauan Sangihe | Sulawesi Tenggara | 1 | Kabupaten Konawe Selatan |
| | 2 | Kabupaten Kepulauan Talaud | | 2 | Kabupaten Muna |
| | 3 | Kabupaten Kepulauan Sitaro | | 3 | Kabupaten Wakatobi |
| Sulawesi Tengah | 1 | Kabupaten Sigi | Gorontalo | 1 | Kabupaten Boalemo |
| | 2 | Kabupaten Tojo Una-Una | Sulawesi Barat | 1 | Kabupaten Mamuju Utara |
| | 3 | Kabupaten Banggai | | | |
| | 4 | Kabupaten Morowali Utara | | | |
| | 5 | Kabupaten Morowali | | | |
| Sulawesi Selatan | 1 | Kabupaten Toraja | | | |
| | 2 | Kabupaten Toraja Utara | | | |
| | 3 | Kabupaten Bone | | | |
| | 4 | Kabupaten Bantaeng | | | |
| | 5 | Kabupaten Bulukumba | | | |
| | 6 | Kabupaten Sinjai | | | |

Prioritas Pembangunan



SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN WILAYAH MALUKU

Sasaran Pembangunan

| Provinsi | Indikator Pembangunan | Realisasi 2018 | Realisasi | Target Pembangunan | | | | |
|--------------|----------------------------------|----------------|-----------|--------------------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Maluku | Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) | 5,95 | 5,57 | 6,00 | 7,00 | 7,20 | 7,90 | 8,50 |
| | Tingkat Kemiskinan (%) | 18,12 | | 17,02 | 16,54 | 14,98 | 13,28 | 11,79 |
| | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | 7,27 | | 6,90 | 6,70 | 6,50 | 6,10 | 5,80 |
| Maluku Utara | Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) | 7,92 | 6,13 | 6,10 | 6,80 | 6,90 | 7,80 | 8,30 |
| | Tingkat Kemiskinan (%) | 6,64 | | 6,00 | 5,40 | 4,89 | 4,04 | 3,15 |
| | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | 4,77 | | 4,20 | 4,00 | 3,90 | 3,40 | 3,10 |

Keterangan:

■ Relatif aman dari dampak virus Corona
 ■ Terdampak oleh virus Corona
 ■ Terdampak parah oleh virus Corona

Kebutuhan Investasi

| Provinsi | Keb. Investasi | Realisasi 2018 | Realisasi 2019 | Target Pembangunan | | | | |
|--------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Maluku | Rp Triliun | 12,44 | 13,14 | 14,37 | 16,32 | 17,80 | 19,54 | 22,20 |
| Maluku Utara | Rp Triliun | 11,21 | 10,60 | 13,32 | 14,72 | 16,44 | 18,51 | 21,53 |

Dalam semester 1 Tahun 2020

- Provinsi Maluku dan Maluku Barat diperkirakan akan merasakan dampak tidak langsung dari menurunnya kunjungan wisatawan asing dan perlambatan ekonomi dunia.
- Kebijakan fiskal tahun 2020 perlu diarahkan untuk mengembangkan kegiatan ekonomi daerah.

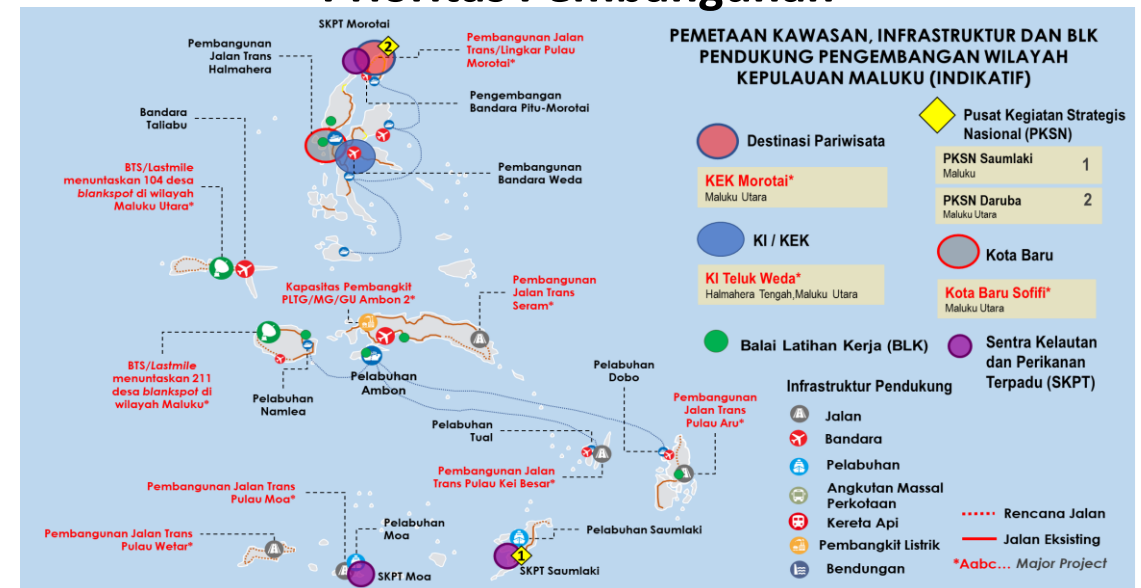
Prioritas Tahun 2021

- Penyediaan insentif dan kegiatan pariwisata nasional.
- Pengembangan kawasan-kawasan ekonomi.

Koridor Pembangunan

| Provinsi | No. | Kabupaten/Kota | Provinsi | No. | Kabupaten/Kota |
|----------------------------|-----|---------------------------------|--------------|-----|-----------------------------|
| Koridor Pertumbuhan | | | | | |
| Maluku | 1 | Kota Ambon* | Maluku Utara | 1 | Kota Ternate* |
| | | | | 2 | Kota Tidore Kepulauan |
| | | | | 3 | Kabupaten Halmahera Tengah |
| | | | | 4 | Kabupaten Halmahera Selatan |
| Koridor Pemerataan | | | | | |
| Maluku | 1 | Kabupaten Maluku Tengah | Maluku Utara | 1 | Kabupaten Pulau Morotai |
| | 2 | Kabupaten Buru | | 2 | Kabupaten Halmahera Utara |
| | 3 | Kabupaten Buru Selatan | | 3 | Kabupaten Halmahera Barat |
| | 4 | Kabupaten Maluku Tenggara | | 4 | Kabupaten Kep. Sula |
| | 5 | Kota Tual* | | | |
| | 6 | Kabupaten Kep. Aru | | | |
| | 7 | Kabupaten Maluku Tenggara Barat | | | |
| | 8 | Kabupaten Maluku Barat Daya | | | |

Prioritas Pembangunan



SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN WILAYAH PAPUA (1/2)

Sasaran Pembangunan

| Provinsi | Indikator Pembangunan | Realisasi 2018 | Realisasi 2019 | Target Pembangunan | | | | |
|-------------|----------------------------------|----------------|----------------|--------------------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Papua Barat | Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) | 6,24 | 2,66 | 5,70 | 6,50 | 7,10 | 7,60 | 8,20 |
| | Tingkat Kemiskinan (%) | 23,01 | | 20,03 | 19,01 | 17,00 | 16,05 | 13,99 |
| | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | 6,30 | | 6,00 | 5,80 | 5,60 | 5,20 | 4,90 |
| Papua | Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) | 7,33 | -15,72 | 4,70 | 5,80 | 6,80 | 7,50 | 7,70 |
| | Tingkat Kemiskinan (%) | 27,74 | | 24,19 | 23,05 | 20,58 | 19,45 | 16,98 |
| | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | 3,20 | | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,50 | 2,30 |

Keterangan:

■ Relatif aman dari dampak virus Corona
 ■ Terdampak oleh virus Corona
 ■ Terdampak parah oleh virus Corona

Kebutuhan Investasi

| Provinsi | Keb. Investasi | Realisasi 2018 | Realisasi 2019 | Target Pembangunan | | | | |
|-------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|-------|--------|--------|--------|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Papua Barat | Rp Triliun | 17,72 | 11,59 | 21,64 | 23,78 | 26,69 | 30,09 | 33,85 |
| Papua | Rp Triliun | 78,80 | 47,72 | 76,54 | 92,69 | 104,03 | 117,47 | 132,84 |

Dalam semester 1 Tahun 2020

- Provinsi Papua Barat diperkirakan akan merasakan dampak dari menurunnya kunjungan wisatawan asing.
- Provinsi Papua harus mengembangkan kegiatan ekonomi non tambang untuk mengatasi penurunan kegiatan tambang khususnya PT Freeport.

Prioritas Tahun 2021:

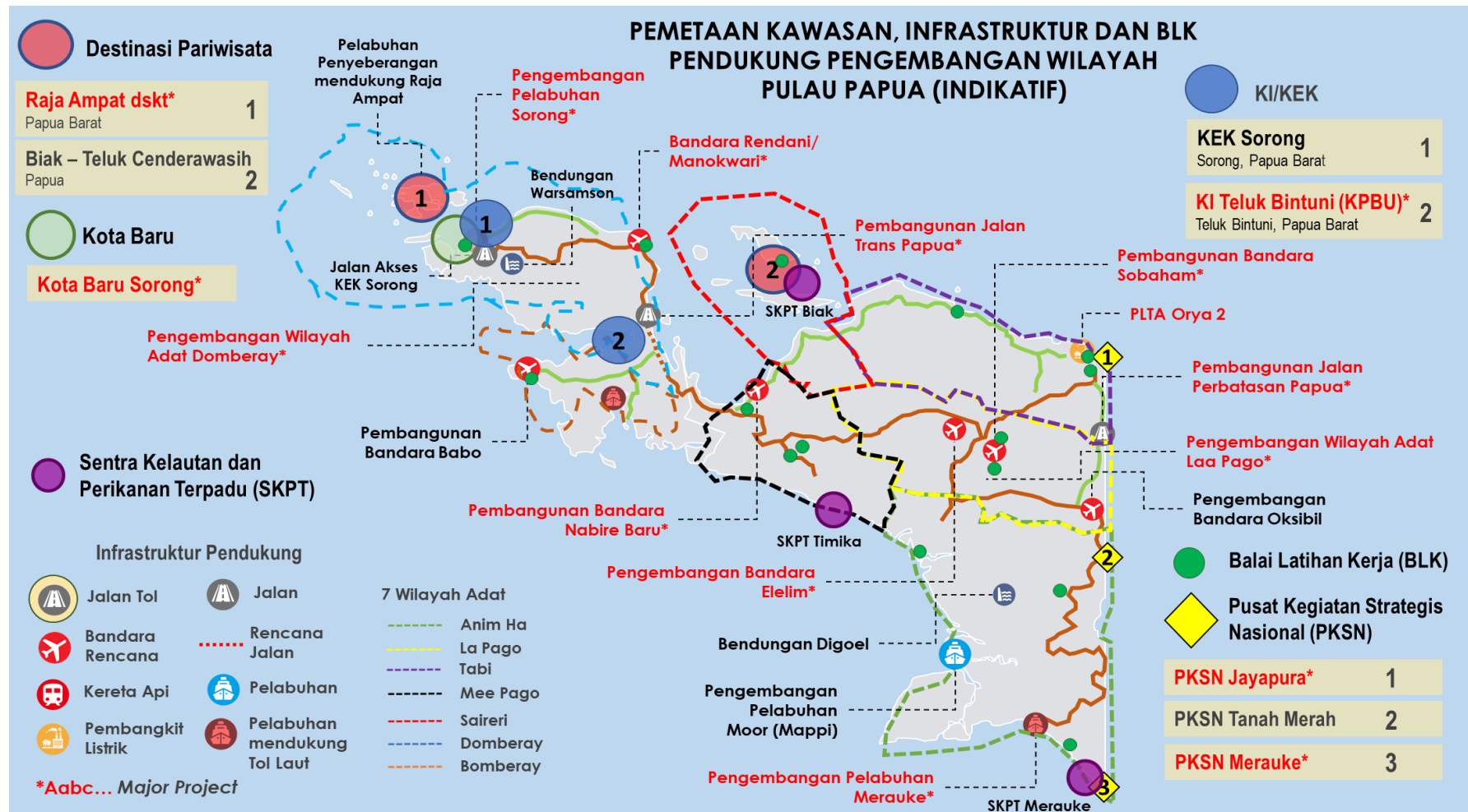
- Penyediaan insentif dan kegiatan pariwisata nasional
- Pengembangan kawasan-kawasan ekonomi.

Koridor Pembangunan

| Provinsi | No. | Kabupaten/Kota | Provinsi | No. | Kabupaten/Kota |
|----------------------------|-----|------------------------------|-------------|-----|-----------------------------|
| Koridor Pertumbuhan | | | | | |
| Papua | 1 | Kabupaten Nabire | Papua Barat | 1 | Kota Sorong |
| | 2 | Kabupaten Dogiyai | | 2 | Kabupaten Sorong |
| | 3 | Kabupaten Mimika | | 3 | Kabupaten Tambora |
| | 4 | Kabupaten Paniai | | 4 | Kabupaten Manokwari |
| | 5 | Kabupaten Deiyai | | 5 | Kabupaten Manokwari Selatan |
| | 6 | Kabupaten Intan Jaya | | 6 | Kabupaten Teluk Wondama |
| | 7 | Kabupaten Puncak | | | |
| | 8 | Kabupaten Puncak Jaya | | | |
| | 9 | Kabupaten Tolikara | | | |
| | 10 | Kabupaten Jayawijaya | | | |
| | 11 | Kabupaten Yalimo | | | |
| | 12 | Kabupaten Jayapura | | | |
| | 13 | Kota Jayapura* | | | |
| | 14 | Kabupaten Keerom | | | |
| | 15 | Kabupaten Pegunungan Bintang | | | |
| | 16 | Kabupaten Boven Digoel | | | |
| | 17 | Kabupaten Merauke | | | |
| Koridor Pemerataan | | | | | |
| Papua | 1 | Kabupaten Biak Numfor | Papua Barat | 1 | Kabupaten Sorong Selatan |
| | 2 | Kabupaten Supiori | | 2 | Kabupaten Maybrat |
| | 3 | Kabupaten Mamberamo Raya | | 3 | Kabupaten Pegunungan Arfak |
| | 4 | Kabupaten Mamberamo Tengah | | 4 | Kabupaten Raja Ampat |
| | 5 | Kabupaten Nduga | | 5 | Kabupaten Teluk Bintuni |
| | 6 | Kabupaten Lanny Jaya | | 6 | Kabupaten Fakfak |
| | 7 | Kabupaten Yahukimo | | | |
| | 8 | Kabupaten Sarmi | | | |
| | 9 | Kabupaten Mappi | | | |

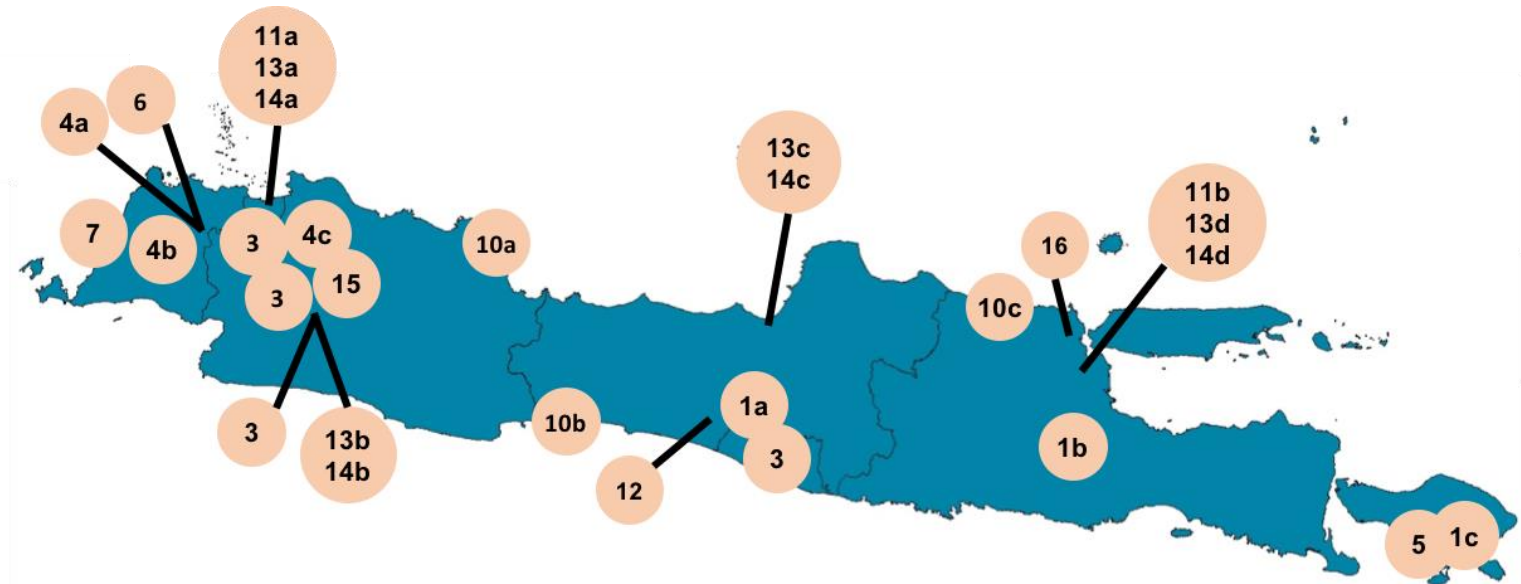
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN WILAYAH PAPUA (2/2)

Prioritas Pembangunan



PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT) DI WILAYAH JAWA-BALI Tahun 2021

1. Pengembangan Wilayah Metropolitan Denpasar
 - a. Pembangunan Bandara Bali Baru
 - b. Pengembangan Bandara Ngurah Rai
 - c. Pengembangan Pelabuhan Sanur
 - d. Pengembangan Angkutan umum massal perkotaan Denpasar berbasis jalan
2. Pembangunan Kota Baru Maja
 - a. Jalan Tol Jabodetabek
 - b. SPALD-S Skala Kota, SPALD-T Skala Permukiman, TPA, TPS3R
 - c. Be Creative District
3. Pemulihan Pasca Bencana Daerah Terdampak
 - a. Layanan pemulihan pascabencana bidang pemulihan bidang sosial ekonomi (BNPB)
 - b. Layanan pendampingan pemulihan Pascabencana Bidang Fisik (BNPB)
 - c. Sekolah yang mendapatkan bantuan Bencana Alam/Sosial (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan)



2 Revitalisasi Tambak di Pantai Utara Jawa

8 Penanganan Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa

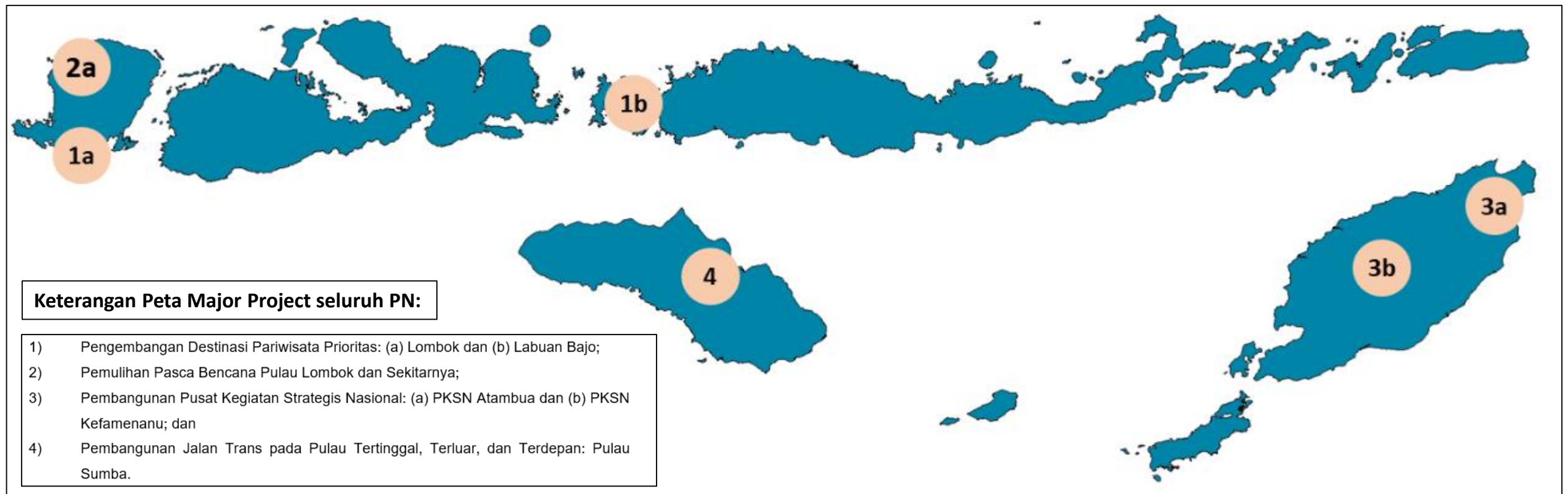
9 KA Cepat Pulau Jawa: Jakarta-Semarang & Jakarta-Bandung

Keterangan Peta Major Project seluruh PN:

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1) Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas: (a) Borobudur Dskt, (b) Bromo-Tengger-Semeru, dan (c) Revitalisasi Bali; 2) Revitalisasi Tambak di Pantai Utara Jawa; 3) Pembangunan Science Techno Park (Optimalisasi Triple Helix di 4 Major Universitas); 4) Pengembangan Wilayah Metropolitan Denpasar; 5) Pembangunan Kota Baru Maja; 6) Pemulihan Pasca Bencana Kawasan Pesisir Selat Sunda; 7) Penanganan Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa; 8) Pembangunan KA Cepat Pulau Jawa (Jakarta-Semarang dan Jakarta-Bandung); 9) Revitalisasi Kilang Minyak: (a) Balongan, (b) Cilacap; dan (c) Pembangunan Kilang Baru Tuban; | <ol style="list-style-type: none"> 10) Pembangunan Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu: (a) Tanjung Priok dan (b) Tanjung Perak; 11) Pembangunan Waduk Multiguna Purworejo; 12) Pembangunan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di Wilayah Metropolitan: Metropolitan (a) Jakarta, (b) Bandung, (c) Semarang, dan (d) Surabaya; 13) Pembangunan Rumah Susun Perkotaan (1 Juta): (a) Provinsi DKI Jakarta, (b) Provinsi Jawa Barat, (c) Provinsi Jawa Tengah, dan (d) Provinsi Jawa Timur; 14) Pemulihan Empat Daerah Aliran Sungai Kritis: Citarum; dan 15) Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 di Jawa Timur. |
|---|--|

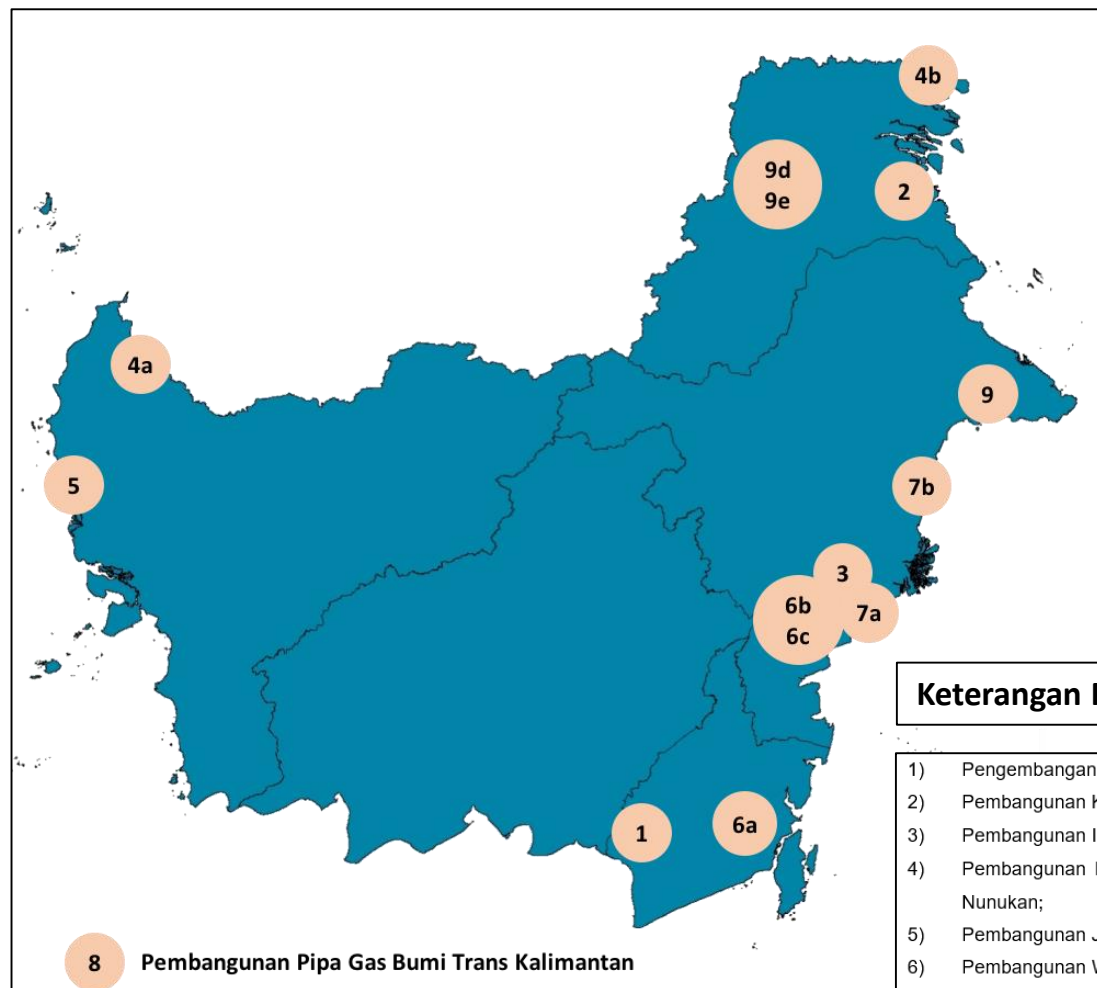
PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT) DI WILAYAH NUSA TENGGARA Tahun 2021

1. Pengembangan Pusat Kegiatan Strategis Nasional: (a) PKSN Atambua dan (b) PKSN Kefamenanu
2. Pemulihan Pasca Bencana Daerah Terdampak
 - a. Revitalisasi pasar rakyat yang dikelola koperasi di daerah tertinggal, perbatasan dan pasca bencana (Kementerian Koperasi dan UKM)
 - b. Layanan pemulihan pascabencana bidang pemulihan bidang sosial ekonomi (BNPB)
 - c. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Peningkatan Kualitas) (Kementerian PUPR)



PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT) DI WILAYAH KALIMANTAN Tahun 2021

1. Pengembangan Wilayah Metropolitan Banjarmasin
 - a. Pengembangan Sistem Angkutan Massal Perkotaan berbasis jalan
 - b. Pembangunan KA Barang Kalimantan (Puruk Cahu - Bangkuang; - Batanjung; Gunung mas - Katingan) (KPBU)
 - c. Jalan Akses Bandara Samsuedin Noer
2. Pembangunan Kota Baru Tanjung Selor
 - a. Pembangunan Pelabuhan Tanjung Selor
 - b. Pengembangan Sistem Angkutan Massal Perkotaan berbasis jalan
 - c. Pengembangan Bandara Tanjung Harapan
3. Pembangunan Ibu Kota Negara
 - a. Rehabilitasi Hutan dan Lahan serta Pemulihan Ekosistem pada kawasan IKN
 - b. Penyiapan Lahan Ibu Kota dari Kawasan Hutan
 - c. Pembangunan infrastruktur di Kawasan IKN (jalan akses ke lokasi IKN, Infrastruktur Dasar, Fungsi Utama, Fungsi Pendukung)
 - d. Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penyusunan Rencana Tata Ruang terkait IKN
4. Pengembangan Pusat Kegiatan Strategis Nasional: (a) PKSN Paloh Aruk dan (b) PKSN Nunukan

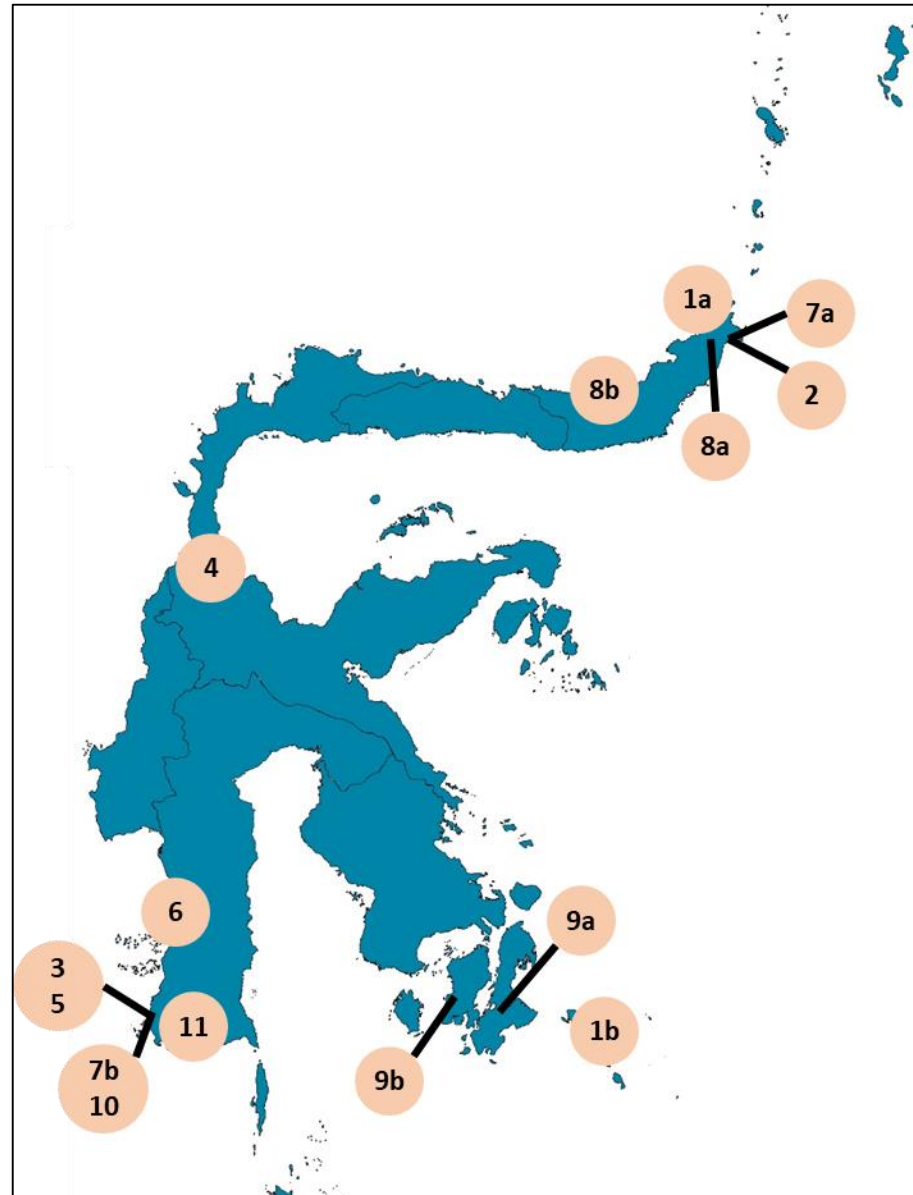


Keterangan Peta Major Project seluruh PN:

- 1) Pengembangan Wilayah Metropolitan Banjarmasin;
- 2) Pembangunan Kota Baru Tanjung Selor;
- 3) Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN);
- 4) Pembangunan Pusat Kegiatan Strategis Nasional: (a) PKSN Paloh-Aruk dan (b) PKSN Nunukan;
- 5) Pembangunan Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu: Pelabuhan Kijing;
- 6) Pembangunan Waduk Multiguna: (a) Kusan, (b) Lembakan, (c) Sepaku Semoi, (d) Kayan, (e) Mentarang;
- 7) (a) Revitalisasi Kilang Minyak Balikpapan dan (b) Pembangunan Kilang Baru Bontang;
- 8) Pembangunan Pipa Gas Bumi Trans Kalimantan; dan
- 9) Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 di Kalimantan Timur.

PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT) DI WILAYAH SULAWESI Tahun 2021

1. Pengembangan Wilayah Metropolitan Makassar
 - a. Pengembangan Pelabuhan Makassar
 - b. Pengembangan Bandara Hasanuddin
 - c. Pembangunan Jalur KA Makassar - Pare Pare (Dukungan KPBU)
 - d. Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di Metropolitan
2. Pemulihan Pasca Bencana Daerah Terdampak
 - a. Revitalisasi pasar rakyat yang dikelola koperasi di daerah tertinggal, perbatasan dan pasca bencana (Kementerian Koperasi dan UKM)
 - b. Pembangunan PSU Rumah Umum Provinsi Sulawesi tengah dukungan rehabilitasi rumah rusak berat (Kementerian PUPR)
 - c. Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Gumbasa (Kementerian PUPR)

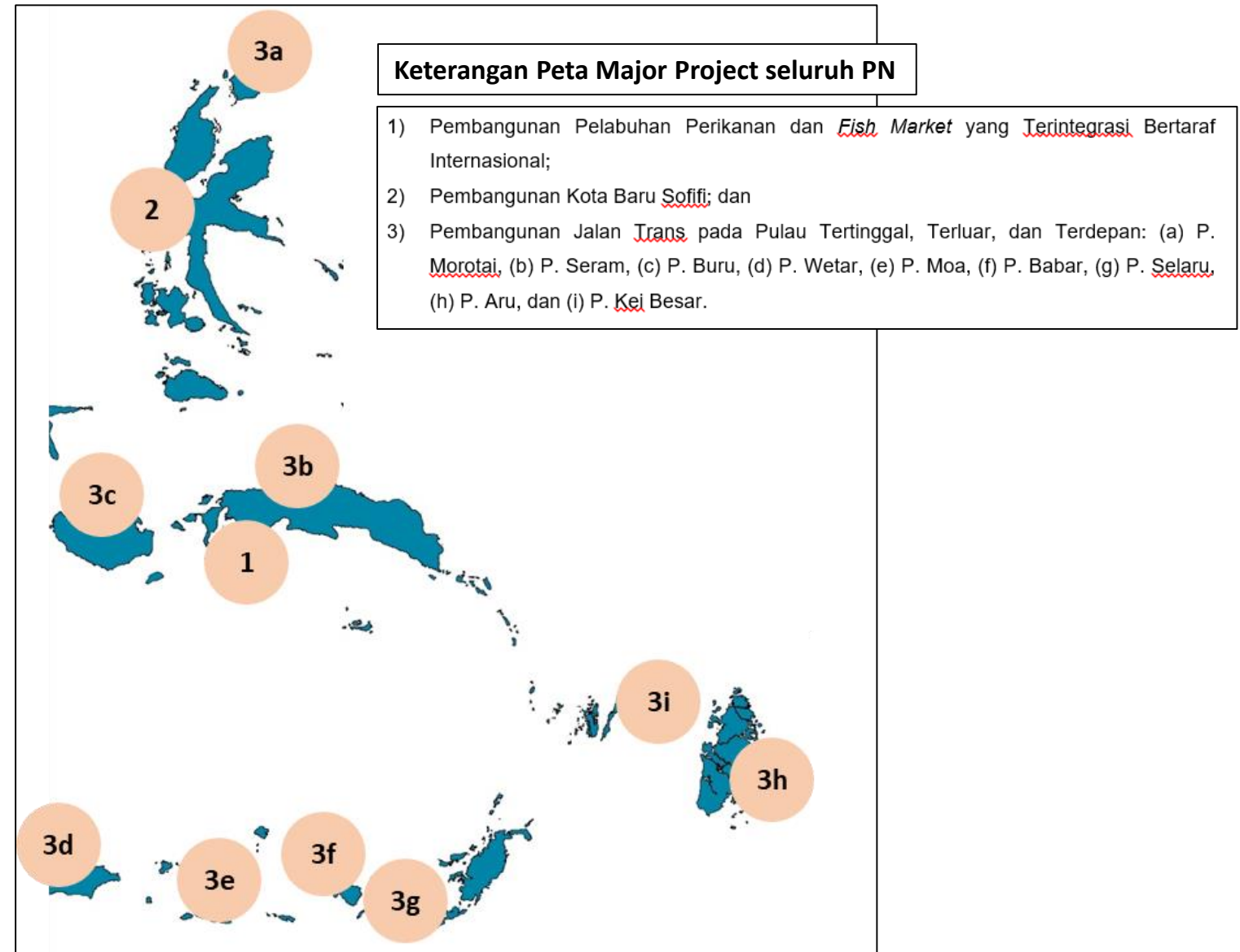


Keterangan Peta Major Project seluruh PN:

- 1) Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas: (a) Manado - Likupang dan (b) Wakatobi;
- 2) Integrasi Pelabuhan Perikanan dan Fish Market Bertaraf Internasional;
- 3) Pengembangan Wilayah Metropolitan Makassar;
- 4) Pemulihan Pasca Bencana Kota Palu dan Sekitarnya;
- 5) Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di Wilayah Metropolitan Makassar;
- 6) Pembangunan KA Makasar-Parepare;
- 7) Pembangunan Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu: (a) Bitung dan (b) Makassar;
- 8) Pembangunan Waduk Multiguna: (a) Kuwil Kawangkoan dan (b) Lolak;
- 9) Pembangunan Jalan Trans pada Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan: (a) Pulau Buton dan (b) Pulau Muna;
- 10) Pembangunan Rumah Susun Perkotaan (1 Juta) di Sulawesi Selatan; dan
- 11) Pembangunan Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 di Sulawesi Selatan.

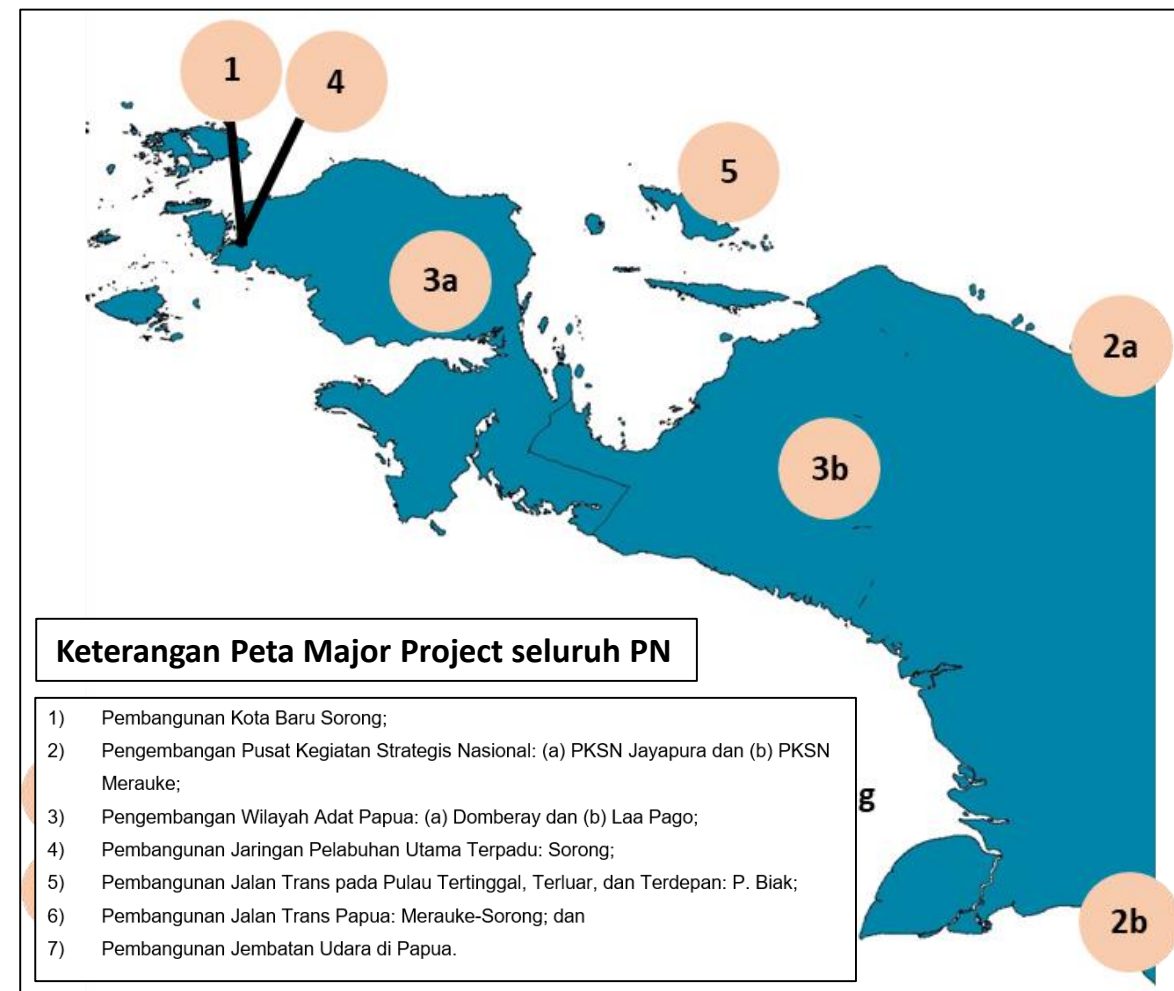
PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT) DI WILAYAH MALUKU Tahun 2021

1. Pembangunan Kota Baru Sofifi
 - a. Pengembangan Sistem Angkutan Massal Perkotaan berbasis jalan
 - b. SPALD-S Skala Kota (IPLT)
 - c. Penyediaan air baku di kawasan perkotaan



PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT) DI WILAYAH PAPUA Tahun 2021

1. Pembangunan Kota Baru Sorong
 - a. Pengembangan Pelabuhan Sorong
 - b. Pengembangan Sistem Angkutan Massal Perkotaan berbasis jalan
 - c. Pengembangan Bandar Udara Domine Eduard Osok
 - d. Pusat Pengembangan Keahlian/Skill Development Center (Fungsi Pendidikan)
2. Pengembangan Pusat Kegiatan Strategis Nasional: (a) PKSN Jayapura dan (b) PKSN Merauke
3. Wilayah Adat Papua: Laa Pago dan Domberay
 - a. Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan di Papua dan Papua Barat
 - b. Revitalisasi Pendidikan Tinggi Vokasi
 - c. Pengembangan tanaman tahunan dan penyegar di Papua dan Papua Barat
 - d. Pembangunan Jalan Trans Papua
 - e. Sarana Prasarana Air Bersih
 - f. Penyediaan Energi Listrik



3 KEBIJAKAN DANA TRANSFER 2020-2024



EVALUASI PERENCANAAN DAK

1) Penetapan Kebijakan



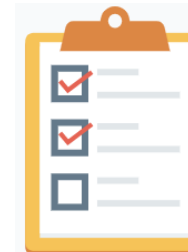
- Beberapa bidang memiliki menu dan rincian kegiatan **semakin banyak** (sebagai contoh di bidang kesehatan, KKP, dll)
- Perbedaan antara jenis DAK (reguler, afirmasi, dan penugasan) **belum konsisten** antar Bidang DAK (apakah membedakan menu kegiatan atau hanya lokasi prioritas)
- Levelling/Struktur antar bidang belum konsisten (contoh antara bidang jalan yang umum dan bidang kesehatan yang sangat rinci)

2) Pengusulan



- Beberapa KL membuat **pengusulan melalui aplikasi Internal** sebelum pengusulan melalui Krisna-DAK, sehingga membingungkan daerah
- **Penetapan bidang/sub-bidang tergantung dari diskresi pemerintah pusat dan bersifat sektoral** (ada menu kegiatan baru di tengah periode pengusulan, inkonsistensi dalam perencanaan bidang/subbidang, belum memiliki pendekatan wilayah/lintas sektor)
- **Kualitas usulan yang beragam** (Pemerintah daerah kurang melakukan seleksi prioritas usulan, Kelengkapan data dan informasi yg sering terbatas, terbatasnya SDM di proses verifikasi pusat dan di daerah)

3) Verifikasi, Penilaian & Sinkronisasi



- Hasil verifikasi oleh Kemendagri belum sepenuhnya menjadi acuan dalam memberikan penilaian Pusat
- Masih rendahnya kapasitas verifikator Pusat dan Daerah, terutama terkait dengan hal-hal teknis

4) Penetapan Alokasi dan RK



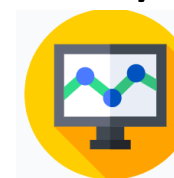
- Penetapan alokasi **belum sepenuhnya merefleksikan** besaran yang diusulkan per bidang dan per daerahnya
- RK berlangsung hingga **melewati batas penetapan APBD**

5) Pelaksanaan Kegiatan



- Juknis oleh KL Pengampu **mengatur terlalu detail/rigid** sehingga menyulitkan penyerapan Alokasi DAK Fisik
- Jukops oleh KL pengampu terbit **terlambat**
- Penetapan final RK **belum menjamin kegiatan dapat dilaksanakan (diserap)** akibat kendala di lapangan seperti misalnya **tumpang tindih** lokasi kegiatan atau ketidaksiapan OPD dalam **pengadaan barang**

6) Evaluasi dan Pemantauan



- **Data dan Informasi** pencapaian target-target bidang DAK 2015-2019 **masih terbatas dan belum optimal**
- Mekanisme pemantauan dan evaluasi di masing-masing K/L Pengampu **belum ter-standar dan terintegrasi**
- Belum ada **sekretariat bersama** yang bertanggungjawab untuk **pengelolaan data dan informasi pencapaian target DAK**. Upaya utk saling tukar informasi antar stakeholder masih terbatas

POKOK-POKOK KEBIJAKAN DTK/DAK 2020-2024

01

Meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan dasar sesuai SPM dan percepatan pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung bagi kesejahteraan rakyat.

Skema reguler yang mencakup pendidikan, kesehatan, air minum dan sanitasi, perumahan dan permukiman, dan transportasi.

02

Meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran prioritas nasional, & pencapaian tujuan pembangunan global; serta mendorong tindakan afirmatif bagi daerah.

Skema penugasan yang bersifat lintas sektor termasuk mendukung daerah konservasi, kawasan strategis dan kewilayahan.

Skema afirmasi bagi daerah-daerah tertinggal, terluar dan terdepan, kawasan perdesaan prioritas nasional, kawasan transmigrasi, kawasan perbatasan, pulau-pulau kecil terluar dan daerah berciri kepulauan.

03

Mempertajam sinkronisasi dan integrasi perencanaan, pengalokasian dan pengelolaan DTK.

Sinkronisasi dan integrasi kegiatan yang didukung oleh sumber pendanaan lainnya: belanja K/L, APBD, KPBU dan swasta.

04

Meningkatkan efisiensi, efektivitas dan keadilan dalam pengalokasian dan pemanfaatan DTK.

Memperhitungkan: (1) satuan biaya, standar belanja dan indeks kemahalan; (2) realisasi tahun sebelumnya; (3) keterkaitan alokasi dan kinerja dengan insentif (*reward*); serta (4) penerapan disinsentif bagi daerah yang melakukan pertukaran DTK dgn APBD.

05

Mendorong daerah dengan kapasitas fiskal tinggi yang melakukan inisiatif pembangunan infrastruktur.

Alokasi hibah berbasis output (*output based transfer*) secara selektif.

06

Memperkuat koordinasi, kerjasama dan kemitraan K/L dan pemerintah daerah dalam pengelolaan DTK.

Mengembangkan: (1) data dasar dan sistem informasi terpadu berbasis website, (2) pendampingan dan peningkatan kapasitas pemerintah daerah, (3) pengendalian penyaluran berbasis kinerja, & (4) pelaporan secara rutin.

07

Meningkatkan tata kelola DTK yang transparan, adil dan akuntabel.

Memperkuat peran APIP di daerah (*pre-audit* dan *post-audit*)

DAK FISIK

Kata Kunci (Key Word)

DAK Fisik Reguler

Orientasi
Pelayanan
Dasar

*Proposal and
Formula
Based*

Continue

Seluruh
Daerah

Pemenuhan **sarana** dan **prasarana dasar** (pelayanan publik dasar) di seluruh daerah yang mendukung pencapaian **Standar Pelayanan Minimal (SPM)** dan **Sustainable Development Goals (SDGs)**

DAK Fisik Penugasan

Prioritas
Nasional

Isu
Lintas
Sektor

Tentatif
Per Tahun

Tematik

Kewilayahan

Dukungan pencapaian **prioritas nasional** dalam penyelesaian **isu-isu nasional** lainnya, serta **arahan presiden** termasuk **isu lintas sektor** serta **isu kewilayahan**.

DAK Fisik Afirmasi

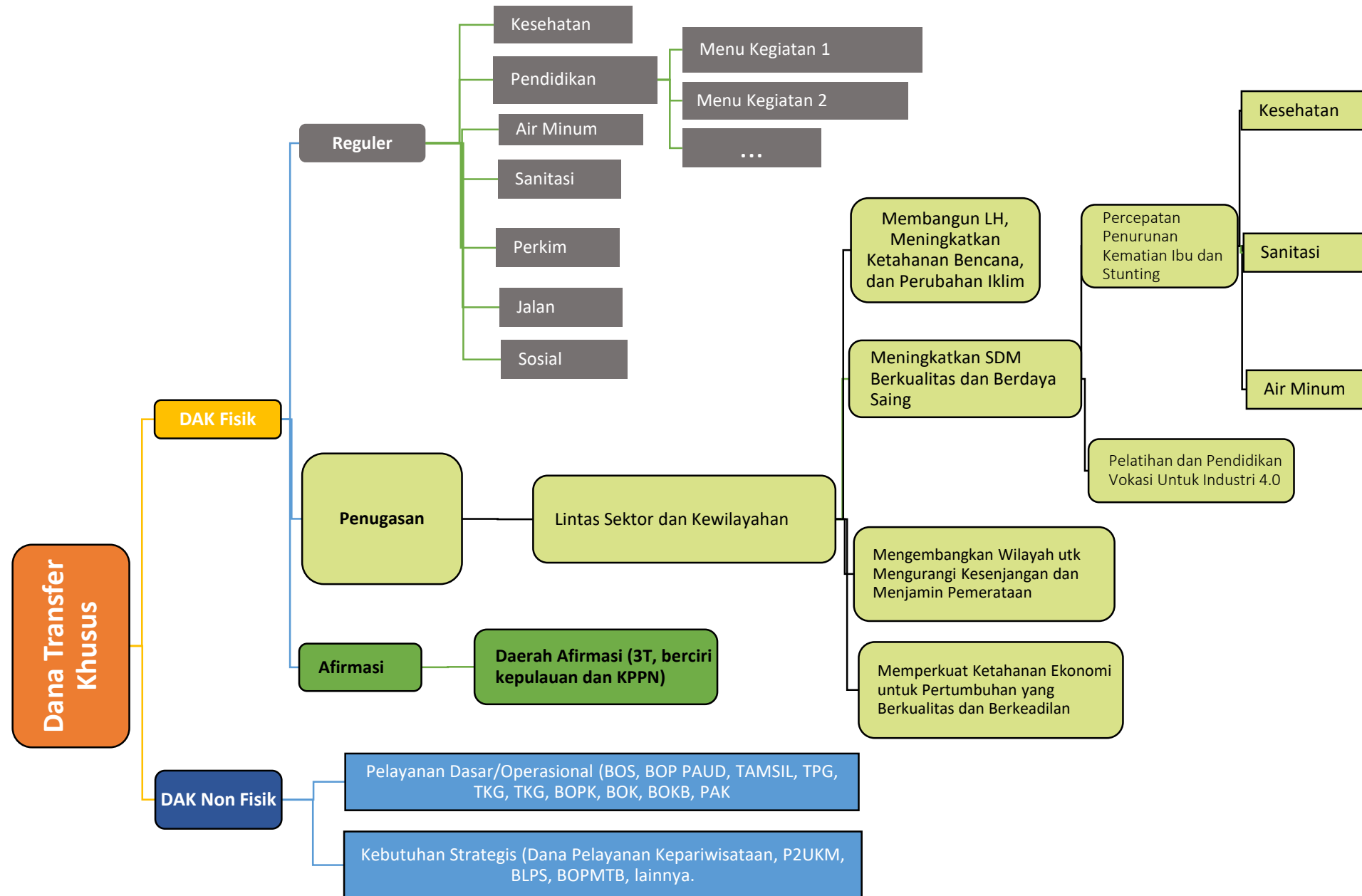
Daerah
Afirmasi

pengalokasian
bersifat tetap

Spesifik

DAK ini ditujukan untuk mendorong **percepatan pembangunan di kawasan tertentu, daerah berciri kepulauan dan daerah afirmasi** (daerah yang memiliki karakteristik tertentu seperti daerah tertinggal, terluar, perbatasan, dan transmigrasi)

STRUKTUR DAK 2020-2024

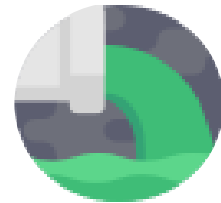


RANCANGAN ARAH KEBIJAKAN BIDANG DAK FISIK REGULER DALAM RPJMN TAHUN 2020-2024

DAK Fisik Reguler Mendukung Pelayanan Publik Mendasar



Pendidikan



Sanitasi



Air Minum



Kesehatan



Jalan



Perumahan &
Permukiman



Sosial

A. Bersifat lanjutan (Bidang tetap dalam 5 Tahun)

Waktu penyelesaian dari DAK ini bersifat lanjutan (*continue*) dan belum dapat ditentukan target akhirnya.

B. Pengalokasian Bersifat Pemerataan

Dalam hal ini seluruh daerah dapat mengusulkan sesuai dengan kebutuhan (*proposal based*).

C. Pengusulan bersifat *Bottom Up*

- Pemerintah daerah mengusulkan atau menyampaikan proposal (*proposal based*) melalui sistem informasi berbasis web mengacu kepada prioritas nasional dalam rencana kerja pemerintah
- Pemerintah pusat melakukan penilaian dan pengalokasian berdasarkan formula tertentu (*formula based*)

RANCANGAN ARAH KEBIJAKAN BIDANG DAK FISIK

PENUGASAN DALAM RPJMN TAHUN 2020-2024

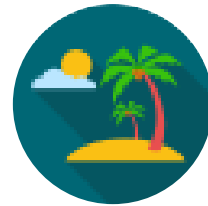
PN 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan



Major Project:

- Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan
- Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng
- Integrasi Pelabuhan Perikanan dan Fish Market Bertaraf Internasional
- Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas
- 10 Destinasi Pariwisata Unggulan

PN 2: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan



Major Project:

- Pusat Kegiatan Strategis Nasional
- Pemulihan Pasca Bencana: (Kota Palu dan Sekitarnya, Pulau Lombok dan Sekitarnya, Serta Kawasan Pesisir Selat Sunda)

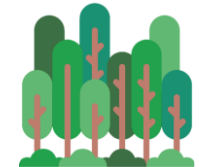
PN 3: Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing



Major Project:

- Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting
- Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Untuk Industri 4.0

PN 6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim



Major Project:

- Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana
- Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3

A. Memiliki Waktu Penyelesaian
Waktu dan target penyelesaian jenis DAK ini ditentukan secara jelas

B. Pengalokasian dan Bidang Bersifat dinamis
Menyesuaikan ketersediaan resource envelope, arahan prioritas nasional dalam RKP dan RPJMN berbasis kewilayahan (*regional approach*).

C. Pengusulan bersifat *Top Down*

- Pemerintah pusat menentukan kebijakan hingga fokus dan lokusnya
- Pemerintah daerah mengkonfirmasi kegiatan yang telah dirancang oleh Pusat.

RANCANGAN ARAH KEBIJAKAN BIDANG DAK FISIK **AFIRMASI** DALAM RPJMN TAHUN 2020-2024



Daerah Afirmasi (daerah 3T , daerah berciri kepulauan dan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN)

PN 2 KP 4: Pemenuhan Pelayanan Dasar

PN 2 KP 5: Pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Pedesaan, dan Transmigrasi

A. Memiliki Waktu Penyelesaian

Waktu dan target penyelesaian jenis DAK ini ditentukan secara jelas

B. Pengalokasian dan Bidang bersifat Dinamis

Ditujukan untuk menyelesaikan isu pemerataan pembangunan di seluruh daerah afirmasi (tertinggal, terdepan, terluar, kawasan perdesaan prioritas nasional, kawasan transmigrasi, kawasan perbatasan, kepulauan, serta Papua) sesuai dengan target pembangunan.

C. Pengusulan bersifat Top Down dan Bottom Up

- Pemerintah pusat menentukan kebijakan hingga fokus dan lokusnya
- Pemerintah daerah mengusulkan kegiatan yang telah dirancang oleh Pusat.

TERIMA KASIH